



Buruh Dorong UMK DIY Lampaui Magelang dan Klaten

YOGYA, TRIBUN - Serikat buruh masih mengeluhkan rendahnya upah minum kabupaten dan kota (UMK) di DIY. Mereka berharap agar UMK 2022 di DIY bisa melampaui dua kabupaten yang berbatasan dengan wilayah ini, yakni Klaten dan Magelang.

Polemik perupahan tersebut, bahkan menjadi salah satu konsen utama dari pengurus Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY periode 2021-2026. Kepengurusan yang diketuai oleh Roeswandi itu, terbentuk melalui Konferensi Cabang (Konfercab) KSPSI DIY, yang bergulir di Kota Yogyakarta, Minggu (26/9/21).

Roeswandi pun mencontohkan, UMK Sleman yang saat ini berada di angka Rp1.903.500, serta lebih rendah dari dua kabupaten yang berbatasan langsung, yakni Magelang (Rp2.075.000) dan Klaten (Rp2.001.514), merupakan permasalahan pelik yang harus diperhatikan.

Bahkan, jika dibandingkan dua daerah tersebut, otomatis, hanya UMK Kota Yogyakarta yang mendekati Magelang dan lebih unggul dari Klaten (Rp2.069.530). Sementara empat kabupaten lain, berada di bawahnya.

"Pengupahan di DIY masih dalam posisi paling rendah. Kita juga tidak muluk-muluk, atau berangan-angan tinggi. Kita berharap bisa di atas, atau seimbang dengan dua daerah yang berbatasan langsung itu," ungkapnya.

Menurut Roeswandi, KSPSI DIY telah melakukan berbagai upaya untuk mendesak pemerintah, agar pengupahan di daerah istimewa ini sedikit terangkat. Bahkan, pihaknya sudah menyurati langsung Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X beberapa waktu lalu.

"Sudah berulang kali itu. Terakhir kita sampaikan pada 8 Oktober 2020, ke Ngarsa Dalem. Kami tidak berhenti mengupayakan terkait upah ini," te-

gasnya.

Akan tetapi, ia mengakui Pemerintah Daerah (Pemda) DI Yogyakarta bersedia mengabulkan usulan serikat pekerja, dengan menaikkan UMP 2021, meski hanya 3,54 persen. Namun, menurutnya, itu sudah cukup baik, mengingat daerah lain tidak ada yang menaikkannya.

Ketua Bidang Organisasi KSPSI DIY, Waljid Budi, mengungkapkan, selain menghadapi polemik upah minim, buruh Yogyakarta saat ini semakin tercekik akibat PPKM. Oleh sebab itu, ia pun berharap pemerintah pusat tidak memperpanjangnya, setelah sekian kali.

Menurut Waljid, PPKM membuat ribuan buruh kehilangan pekerjaannya, karena tidak sedikit perusahaan yang kolaps. Dipaparkannya, dalam kurun lima tahun terakhir, anggota KSPSI DIY terus mengalami penurunan. Puncaknya, saat pandemi virus corona mulai merajang, (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005